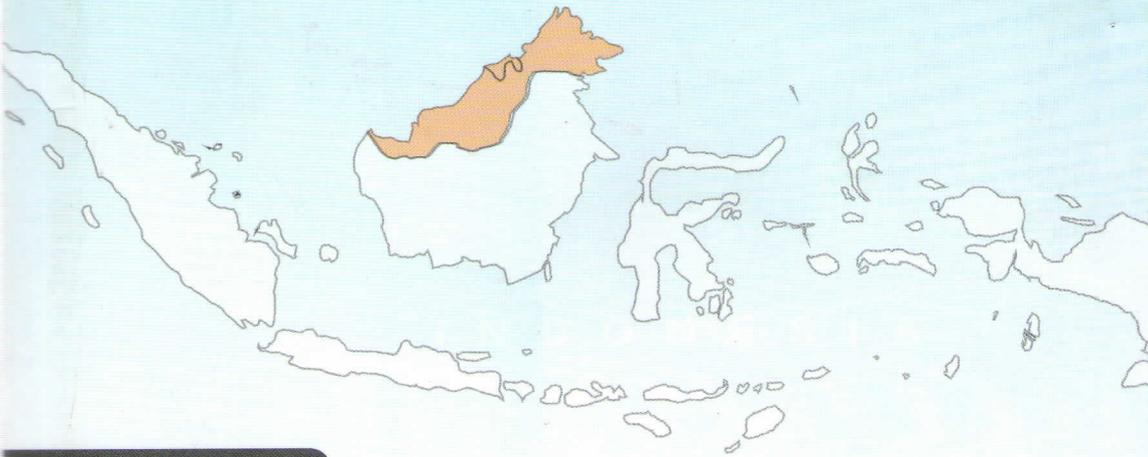


Prosiding Simposium Nasional  
Mahasiswa Pascasarjana Tahun 2008

# “100 Tahun Kebangkitan Nasional Dalam Berbagai Perspektif”

Yogyakarta, 16 - 17 Mei 2008

Penyunting: M. Ridhah Taqwa, dkk.



Klaster:

**EKONOMI dan POLITIK  
SOSIAL dan HUMANIORA**

Himpunan Mahasiswa Pascasarjana  
Universitas Gadjah Mada  
(HMP UGM)



Prosiding Simposium Nasional  
Mahasiswa Pascasarjana Tahun 2008

# “100 Tahun Kebangkitan Nasional Dalam Berbagai Perspektif”

Yogyakarta, 16 - 17 Mei 2008

**Penyunting: M. Ridhah Taqwa, dkk.**

## EKONOMI dan POLITIK SOSIAL dan HUMANIORA



Himpunan Mahasiswa Pascasarjana  
Universitas Gadjah Mada  
(HMP UGM)

## **TIM PENYUSUN**

### **Tim Penyunting Makalah**

#### **Ketua :**

M. Ridhah Taqwa, M.Si

#### **Anggota :**

Nidah Nadawati  
Mubarak Azmie  
A. Tenri Pada Rustham  
Nur Afni Indahari Arifin  
Andi Nasrawaty Hamid  
Trisna  
Sulisno

#### **Tim Pembahas Makalah :**

Prof . Dr. Irwan Abdullah  
Prof. Dr. Ir. Achmad Mursyidi, M.Sc, Apt.  
Prof. Dr. Noor Rachman Hadjam  
Prof. Dr. Susetiawan  
Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec  
Dr. Aris Arif Mundayat  
Dr. Sudibyakto, M.S.  
Dr. Kamsul Abraha  
Dr. Chairil Anwar  
Dr. Suharko

#### **Diterbitkan :**

Himpunan Mahasiswa Pascasarjana  
Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta  
Mei, 2008

## KATA PENGANTAR

Tahun 2008 ini, merupakan tahun istimewa bagi bangsa Indonesia karena pada tahun ini kita menyongsong tiga momentum sejarah spektakuler, yaitu 100 Tahun Kebangkitan Nasional (1908-2008); 80 Tahun Sumpah Pemuda (1928-2008), dan 10 Tahun Era Reformasi (1998-2008). Ketiga peristiwa sejarah pada abad ke-20 itu merupakan tonggak-tonggak sejarah kebangkitan bangsa, sebagai respon generasi muda terdidik terhadap situasi krisis multidimensi yang melanda semua lapisan masyarakat.

Dewasa ini, bangsa kita masih dilanda multikrisis, yang meliputi krisis moral, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Krisis tersebut merupakan akumulasi dari ketidakcakapan kita dalam mengelola kekayaan alam (SDA), ketidakcerdasan kita menynergikan keragaman masyarakat (SDM), ketidakserasian kita dengan lingkungan alam, dan kekurangcermatan kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (lokal-modern), serta yang paling dahsyat adalah ketidakberdayaan kita mengendalikan hastrat untuk memiliki. Akibatnya, kedaulatan kita sebagai bangsa merdeka tercabik-cabik, kekayaan alam murka kepada kita, perilaku korup yang merajalela, konflik kekerasan merebak di mana-mana, kemiskinan meningkat, krisis lingkungan mengancam, hukum tidak berdaya dan semakin tidak beraturan, serta barang konsumsi kita yang beracun. Intinya, segala macam relasi sosial yang melibatkan manusia, alam dan teknologi semakin beresiko tinggi, sekaligus mencemaskan.

Gambaran situasi krisis multidimensi di atas membutuhkan kehadiran dan kecerdasan generasi cendekiawan muda dari kalangan mahasiswa pascasarjana, tidak hanya membentangkan sejuta masalah, tetapi juga mampu mengungkapkan latar belakang, sekaligus menguraikan strategi atau solusi untuk keluar dari krisis tersebut. Cendekiawan muda diharapkan untuk menunjukkan peran yang dapat dimainkan oleh dirinya sebagai pakar muda dan disiplin ilmu yang dimilikinya. Lebih dari itu, kontribusi yang diharapkan pada generasi bangsa ini berupa kapasitas intelektual dan atau kompetensi keilmuan yang dimiliki harus mampu disnergikan dengan berbagai pakar dan disiplin ilmu. Dengan demikian, melalui pendekatan transdisiplinaritas menjadi keharusan untuk mengantarkan bangsa Indonesia segera keluar dari situasi krisis, sehingga tidak

berkepanjangan. Jika itu yang terjadi, maka akan mengancam identitas dan eksistensi kita sebagai bangsa yang besar, merdeka dan berdaulat.

Atas dasar pemikiran tersebut, mahasiswa pascasarjana di UGM, sebagai universitas unggulan bervisi kebangsaan dan kerakyatan menggelar Simposium Nasional Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia, sebagai forum rembuk berskala nasional dengan melibatkan mahasiswa pascasarjana dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi. Sumbangan pemikiran para mahasiswa pascasarjana yang didokumentasikan dalam bentuk prosiding ini diharapkan menjadi alternatif solusi bagi sebagian kecil krisis bangsa.

Adapun maksud dan tujuan dari penyelenggaraan simposium ini adalah:

1. Merentang dan merumuskan masalah mendasar bagi bangsa dari berbagai perspektif keilmuan,
2. Mencari dan merumuskan solusi terbaik terhadap krisis bangsa dari berbagai pendekatan keilmuan, keagamaan dan kebudayaan,
3. Membangun jaringan dan sinergitas antar generasi muda,
4. Menumbuhkan kepedulian dan partisipasi aktif pada tatanan kehidupan bangsa ke depan yang lebih baik.

Simposium nasional mahasiswa pascasarjana pertama ini diharapkan dapat diagendakan secara berkala dan bergulir dari kampus ke kampus Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pascasarjana. Hal ini dimaksudkan terutama untuk memfasilitasi tumbuh kembang pakar-pakar muda yang mampu mengantarkan kita menjadi bangsa yang maju, unggul dan bermartabat.

Hasil pemikiran para mahasiswa pascasarjana yang dipresentasikan dalam simposium, selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk prosiding yang terdiri dari empat klaster, yaitu Sains Teknologi, Agro-Kesehatan, Ekonomi Politik dan Sosial Humaniora. Keempat klaster tersebut dibagi menjadi dua prosiding.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya simposium perdana ini, terutama kepada pimpinan universitas Gadjah Mada, direktur sekolah pascasarjana, Bank Indonesia, PT. Telkom, Kompas dan PT. Bosowa yang telah mendukung kesuksesan acara simposium. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga dihaturkan kepada semua mahasiswa pascasarjana (S2/S3) yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, khususnya yang mengirimkan gagasan, temuan atau hasil penelitian kepada panitia, serta pada semua panitia yang telah bekerja keras

dengan penuh komitmen untuk mempersiapkan simposium nasional sampai terbitnya prosiding ini. Semoga prosiding yang terdiri dari empat klaster ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 10 Mei 2007  
Ketua Umum HMP UGM

M. Ridhah Taqwa, M.Si

## DAFTAR ISI

### I. KLASSTER EKONOMI POLITIK

1. Perjuangan Kelas Marhain Yang Tidak Kunjung Selesai:  
Analisis Potret Sosial Pahlawan Devisa Di Negeri Jiran ..... 3  
*Silfia Hanani*
2. Gelombang Pembentukan Daerah Pasca Orde Baru:  
Saatnya Menahan Laju Kebangkrutan Nasional dan  
Mendayagunakan Modal Kebangkitan Nasional ..... 17  
*Syafaruddin*
3. Analisis Kesanggupan Membayar (WTP) Masyarakat  
Untuk Peningkatan Kualitas Air Sungai Berdasarkan  
Contigent Valuation Method (CVM) ..... 37  
*Herdiana Kusumaningrum dkk*
4. Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Kenaikan Harga  
Beras Regional Dan Perspektif Ketahanan Pangan (Studi  
Kasus Jawa Timur) ..... 47  
*Alie Sadikin dan Unik Setiawati, Arofah M*
5. Peran Serta Masyarakat Pemanfaat Pantai Dalam  
Pengelolaan Wilayah Pantai Anyer-Ciwandan (Propinsi  
Banten)..... 63  
*Ade Suprizal*
6. Kerangka Aksioma Etik Ekonomi Islam ..... 87  
*Rahmani Timorita Yulianti*
7. Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Konteks  
Globalisasi: Sebuah Tinjauan Kerangka Konseptual ..... 107  
*Willy Abdillah*
8. Strategi Pemasaran Ekspor PT.Global Tropical Seafood  
dalam menghadapi Kekuatan Pasar Global ..... 131  
*Djamaluddin*
9. Komunikasi Mbok-Mbok Bakul Perempuan Pedagang dan  
Konstruksi Realitas Sosial dalam Kehidupan Sehari-  
Harinya di Pasar Tradisional ..... 145  
*YP.Wahyu Gunawan*
10. Involusi Kebudayaan: Dampak Kultural Pembangunan  
Kawasan Yang Kapitalistik ..... 169  
*Nidah Nadawati*

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 11. | Perlindungan HAM Salah Satu Bentuk Penegakan Hukum Konstitusi Negara dan UDHR 1948 .....  | 187 |
|     | <i>Azmi Polèm</i>   |     |
| 12. | Implementation of Quality Management System (TQM) in Higher Education Case study: STT Multimedia Cendekia Abditama/ Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) Perguruan Tinggi ..... | 199 |
|     | <i>Jarot S. Suroso</i>  |     |
| 13. | Fundamental Ekonomi Indonesia "Ersatz" .....  | 215 |
|     | <i>Amiruddin</i>  |     |
| 14. | Proses Politik Domestik Amerika Serikat Dalam Meratifikasi Protokol Montreal Domestic Political Process of The United States of America In Ratifying The Montreal Protocol .....    | 229 |
|     | <i>M. Fathurrohman attirmidzi</i>   |     |

## II. KLASSTER SOSIAL HUMANIORA

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Pengaruh budaya Pengasuhan Budaya Bugis Terhadap Kecenderungan Cinderella Complex Pada Perempuan Bugis ..... | 241 |
|    | <i>Patmawaty Taibe, S.Psi.</i>   |     |
| 2. | Game Online; Potret Fenomena Kecanduan Komunikasi Pada Kalangan Terpelajar.....                              | 255 |
|    | <i>Susilo Wibisono</i>   |     |
| 3. | Pengalaman Emosi Dalam Pengambilan Keputusan Di Organisasi .....   | 267 |
|    | <i>Andi Nasrawaty Hamid</i>  |     |
| 4. | Pengaruh Kebiasaan Menonton Televisi Terhadap Penyesuaian Sosial Pada Anak Usia Sekolah .....                | 283 |
|    | <i>Nur Afni Indahari Arifin</i>  |     |
| 5. | Problematika Sistem Pendidikan Indonesia Dan Alternatif Pembenaannya.....                                    | 297 |
|    | <i>Acep Supriadi dan Muhammad Danial</i>   |     |
| 6. | Prasangka: Sebuah Tinjauan Akar Konflik Perspektif Psikologi .....   | 311 |
|    | <i>Mustadin Taggala</i>  |     |
| 7. | Program Pendidikan Islam Luar Sekolah Pemerintah Kota Padang.....  | 323 |
|    | <i>Reza Fahmi</i>  |     |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 8.  | Lingkungan Pendidikan Sekolah Alam Miftahul Jannah.....   | 335 |
|     | <i>Faradillah Firdaus dan Setiawati Intan Savitri</i>   |     |
| 9.  | Pendidikan Multikultural: (Studi Terhadap Pembelajaran Fiqh di MTs. Safinatul Huda 02 Karimunjawa Jepara) ..... | 351 |
|     | <i>Hisyam Zamroni</i>   |     |
| 10. | Poligami Dalam Perspektif Posfeminis Analisis Skenario Film Berbagai Suami .....                                | 371 |
|     | <i>Ika Qurrota A'yunin</i>  |     |
| 11. | Partisipasi Guru Dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan   | 389 |
|     | <i>Siti Irene Astuti D</i>  |     |
| 12. | Resilience and Gender Stereotypes among Women in Nias After the Earthquake and Tsunami Disasters.....           | 403 |
|     | <i>Adelina R. Simatupang &amp; Nanum Sofia</i>  |     |
| 13. | Sorga Bertepi Kekerasan ( <i>Melacak Jejak Teror dan Sweeping di Bali</i> ) .....                               | 423 |
|     | <i>I Ngurah Suryawan</i>  |     |
| 14. | Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia .....   | 453 |
|     | <i>Alum Petronella Simbolon</i>   |     |
| 15. | Menyoal Praktik Kekuasaan Di Arena Pendidikan Perspektif Cultural Studies .....                                 | 467 |
|     | <i>M. Ridhah Taqwa</i>  |     |

# MENYOAL PRAKTIK KEKUASAAN DI ARENA PENDIDIKAN BERBASIS KEAGAMAAN SUATU PERSPEKTIF CULTURAL STUDIES

Oleh

M. Ridhah Taqwa

Program Doktor Sosiologi Fisipol UGM, Dosen Sosiologi Fisip  
Universitas Sriwijaya  
e-mail : taqwa@ugm.ac.id

## ABSTRAK

Arena pendidikan tidak steril dari praktik kekuasaan. Modal kekuasaan berlangsung praktik kekuasaan itu adalah otoritas, pengetahuan, kepentingan dan ideologi. Ideologi yang bersumber dari nilai agama seperti kepatuhan, maupun nilai dalam pendidikan potensial menjadi modal beroperasinya praktik kekuasaan. Karena itu usaha untuk menyemaikan praktik demokrasi deliberatif di arena pendidikan, terkendala oleh praktik dominasi kekuasaan tersebut. Akibatnya partisipasi masyarakat luas dalam menyelenggaraan pendidikan juga menjadi minimal. Ada pula kecenderungan sejumlah pihak berusaha melakukan perlawanan terhadap praktik kekuasaan di arena pendidikan. Resistensi tersebut sebagai bagian dari semangat demokratisasi, sebagaimana yang terjadi pada arena politik. Proses ini penting artinya untuk menjadikan arena pendidikan sebagai arena pembebasan dari praktik dominasi. Realisasi antara stakeholder di arena pendidikan penting untuk dikaji secara mendalam dan selanjutnya ditata untuk menyemaikan praktik demokrasi deliberatif.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Kekuasaan, Ideologi, Resistensi, Sumber Kekuasaan

## PENDAHULUAN

Pada era reformasi usaha pemerintah untuk menata institusi pendidikan mulai mendapat perhatian yang serius, khususnya ditinjau dari perubahan paradigma kelembagaan pendidikan yang terpusat. Prinsip-prinsip pengelolaan sebuah institusi politik pun mulai banyak diadopsi untuk membenahi institusi pendidikan, seperti pengelolaan lembaga pendidikan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Karena itu, kebijakan pendidikan yang pada era orde baru bersifat sentralistis, kini semakin didesentralisasikan ke daerah. Demikian pula lembaga pendidikan yang dikelola swasta yang juga sangat tergantung pada induk organisasi (yayasan), kini semakin



|               |                |                |              |                 |                |                    |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0             | 8              | 0              | 2            | 0               | 9              | 0                  | 1                                  | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Kode Fakultas | Kode PS/Bagian | Kode Publikasi | Kode Penulis | Tahun Publikasi | Kode Publikasi | Kode Sumber Tuisan | Nomor urut Publikasi dari Fakultas |   |   |   |   |   |   |   |   |

didorong untuk diotonomikan ke sekolah, dan partisipasi masyarakat dalam arena ini semakin diperluas.<sup>1</sup>

Dengan perluasan partisipasi masyarakat itu diharapkan pengambilan keputusan yang tadinya terpusat (dari atas) berubah menjadi partisipatif (dari bawah). Dalam konteks otonomi ini kemudian kelembagaan pendidikan mengalami perubahan dengan adanya kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Manajemen Berbasis Masyarakat. Pada tingkat sekolah dibentuk Komite Sekolah sebagai wadah untuk mendorong perluasan partisipasi masyarakat (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan Komite Sekolah yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat diharapkan tidak hanya sekedar memberi dukungan, tetapi yang lebih penting lagi turut mengontrol, mengevaluasi dan memberi pertimbangan atau masukan dalam penyusunan kebijakan anggaran pendidikan maupun penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Struktur kelembagaan pendidikan memang telah mengalami perubahan mendasar, namun dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Ada sejumlah kajian yang bertolak-belakang dengan misi perubahan kelembagaan pendidikan tersebut. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua wali sangat minim. Kalaupun ada masih terbatas sebagai pemberi dukungan dana (*infut*), bukan pada proses pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas anggaran.<sup>2</sup> Partisipasi masyarakat pun menjadi minimal karena tersubordinasi oleh pengelola lembaga pendidikan yang mendominasi pengambilan keputusan, khususnya anggaran.<sup>3</sup> Apalagi akhir-akhir ini penyelenggaraan pendidikan semakin dikomersialkan pada semua tingkatan, termasuk usia dini, sehingga tidak terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Perubahan kebijakan otonomi pendidikan (sekolah) dengan perluasan partisipasi masyarakat, potensial atau bahkan telah menimbulkan resistensi terhadap kekuasaan di arena pendidikan.<sup>4</sup> Perubahan secara kelembagaan selain, menimbulkan keragaman

---

<sup>1</sup> Perluasan partisipasi masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah dituangkan dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal 56, ayat 1 sampai ayat 3.

<sup>2</sup> Lihat A.F Saefuddin, *Multicultural Education: Putting School First (a Lesson from the Education Autonomy Policy Implementation in Indonesia)*. Jurnal Antropologi UI, 2004. page 97.

<sup>3</sup> Lihat Sumarno dkk, *Filosofi, kebijakan dan strategi pendidikan nasional*, dalam F. Jalal dan D. Supriadi (editor). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita-Bappenas, Depdiknas. Yogyakarta. 2001, hal. 55. Buku ini merupakan *blue print* dari Reformasi dibidang pendidikan yang terus bergulir sampai sekarang.

<sup>4</sup> Lihat Soekarno dkk. *Otonomi Daerah dan Pluralitas Lokal*. Puslit Politik LIPI, Jakarta, 2004. hal. 149-150.

bentuk kelembagaan yang meliputi hak dan kewajiban, tanggung jawab serta mekanisme kontrol terhadap kinerja lembaga, juga keragaman kepentingan pada institusi pendidikan swasta yang dalam pengelolaannya berdasar pada konsensus dan lebih fleksibel.<sup>5</sup> Dalam situasi ini pengelola sekolah sangat potensial mempertahankan dominasi-hegemoninya, karena dalam arena pendidikan tidak terlepas dari kepentingan ekonomi politik (kehormatan). Karena itu, institusi pendidikan yang berbasis keagamaan sekalipun, tidak steril dari pertarungan kekuasaan, sehingga berpotensi konflik. Misalnya, masih dominannya peran kepala sekolah dan atau pengurus sekolah (yayasan) bagi swasta dalam pengelolaan pendidikan. Sementara peran masyarakat yang direpresentasi komite sekolah potensial terpinggirkan. Keberadaan komite sekolah boleh jadi hanya formalitas untuk memenuhi ketentuan peraturan pemerintah, seperti keberadaan BP3 pada era orde baru. Konsekuensinya fungsi komite sebagai pemberi pertimbangan, pengontrol, pengawas dan mediator menjadi sangat terbatas. Peraturan pemerintah yang mensyaratkan partisipasi komite dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tidak semua dipenuhi sekolah.

Dalam konteks perubahan kebijakan ini institusi pendidikan diasumsikan masih menjadi arena relasi kekuasaan antar *stakeholder*, termasuk sekolah swasta yang dikelola organisasi sosial keagamaan yang sudah mapan. Idiologi pendidikan yang dianut penyelenggara pendidikan dapat menjadi sumber praktik dominasi kekuasaan, tidak hanya antara pengelola sekolah dan dewan guru, tetapi juga antara komite sekolah dan pengurus sekolah (yayasan), bahkan antar komite sekolah dengan guru. Dalam situasi seperti ini, usaha untuk memanfaatkan relasi kekuasaan akan semakin terbuka dan intens, sehingga dominasi atau hegemoni kekuasaan tidak hanya berlaku dalam institusi politik atau ekonomi tetapi juga potensial berlaku di arena pendidikan (sekolah).

Organisasi sosial keagamaan yang telah melembagakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikannya sebagai misi dakwah, berpeluang pula menjadi arena kekuasaan. Dengan pemapanan seperti ini, secara kelembagaan sekolah cenderung eksklusif, sehingga rawan menjadi praktik dominasi-relasi kuasa terhadap *stakeholders* lain. Jika gejala ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama akan semakin kontradiksi dengan misi pendidikan sebagai arena pembebasan untuk membangun bangsa beradab.

---

<sup>5</sup> Lihat S. Usman, *Peta masalah dan Kebijakan Pendidikan*, Makalah, Juni 2005. hal. 2.

Atas pemikiran di atas, maka praktik kekuasaan dalam arena pendidikan yang berideologi agama, seperti sekolah dipandang menarik dan penting dikaji atau dikritisi. Karena pertanyaan yang dianggap mendasar dalam hal ini adalah mengapa dan bagaimana praktik kekuasaan bisa berlangsung secara masif dalam arena pendidikan berbasis keagamaan? Perspektif *cultural studies* akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menyoal praktik kekuasaan di arena pendidikan. Karena itu, ada sejumlah pemikiran tentang kekuasaan yang diulas untuk mendukung kajian ini.

## TINJAUAN TEORITIK PRAKTIK KEKUASAAN

Ada dua hasil kajian yang relevan untuk dijadikan acuan sekaligus untuk memperkuat argumentasi pentingnya topik praktik kekuasaan ini, yaitu Tilaar dan Simandjuntak. Kajian Tilaar banyak terfokus pada hubungan kekuasaan dengan pendidikan dari perspektif studi kultural (*cultural studies*). Dia memandang bahwa masalah pendidikan dalam konteks kebudayaan tidak luput dari kekuasaan, dan karena itu kekuasaan tidak hanya menjadi garapan ilmu politik atau sosiologi, tetapi juga kajian kebudayaan.<sup>6</sup> Untuk memperkaya analisisnya Tilaar banyak meminjam konsep-konsep dalam ilmu politik dan sosiologi yang juga biasa digunakan dalam studi kebudayaan, seperti konsep ideologi dan hegemoni Gramsci, pengetahuan-kekuasaan dari Nietzsche dan Foucault, selain dari teoritikus studi kultural sendiri, dari Eropa, Australia dan Asia.

Yang menarik dari uraian Tilaar bahwa pendidikan sebagai transformasi sosial tidak terlepas dari konteks kekuasaan. Kekuasaan yang berkepentingan terhadap proses pendidikan, tidak terbatas dari kekuasaan negara, tetapi juga dari kelompok sosial yang lebih luas (masyarakat sipil). Dalam konteks Kajian ini kekuasaan yang dimaksud diasumsikan berada di tangan penyelenggara pendidikan, dan bagi sekolah swasta biasanya di tangan yayasan atau pengurus organisasi sosial. Relasi kuasa di antara *stakeholder* dalam pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat tergantung dengan kebijakan dan kepentingan penyelenggara pendidikan tersebut. Stakeholder sekolah seperti pemerintah (pusat-daerah), masyarakat, dunia usaha juga ditelaah oleh Tilaar, dimana pihak terkait yang dimaksud tidak hanya berlaku bagi sekolah swasta yang memang relatif sudah otonom dari sisi pembiayaan, tetapi juga sekolah negeri.<sup>7</sup> Peran yang diharapkan (*role expectation*) dari *stakeholder* ini berupa partisipasi dalam manajemen atau penyelenggaraan

---

<sup>6</sup> Lihat Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan Perspektif Studi Kultural*. Indonesiatara, 2003: hal. xxiv.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 283-285.

pendidikan pada semua level, termasuk pendidikan usia dini. Perluasan partisipasi ini berkaitan dengan semangat demokratisasi dalam arena pendidikan.

Idiologi sebagai salah modal kekuasaan termasuk dalam arena pendidikan juga disoroti oleh Tilaar dengan meminjam teori Gramsci dan Althusser. Idiologi pada mulanya memang terkait dengan kekuasaan yang terpusat pada negara atau masyarakat politik, berhadapan-hadapan dengan masyarakat sipil. Belakangan tesis itu ditolak Gramsci dengan menyatakan, bahwa idiologi tidak hanya dimenangkan melalui jalan revolusi atau kekerasan melalui institusi negara, tetapi juga dengan jalan hegemoni melalui institusi lain, seperti agama, media massa, dan pendidikan serta institusi keluarga. Sementara Althusser menyatakan bahwa idiologi sebagai sistem keyakinan menyembunyikan kontradiksi-kontradiksi internalnya. Dalam bahasa Foucault idiologi dapat berlawanan dengan kebenaran sejati, selain karena berada ditangan kelas berkuasa, juga karena sering bersifat represif.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat dipahami kontradiksi internal idiologi dapat pula beroperasi di berbagai institusi sosial, termasuk arena pendidikan, walaupun institusi ini bertujuan transformatif. Jadi idiologi sesungguhnya pedang bermata dua. Disatu sisi idiologi sebagai ide yang melegitimasi kekuasaan politik yang dominan, baik melalui persetujuan maupun secara represif. Sedang sisi lain idiologi juga mampu membebaskan manusia dari berbagai belenggu kekuasaan.

Dengan demikian idiologi secara umum bertujuan untuk melakukan transformasi sosial yang lebih luas sehingga tercapai kehidupan yang berkeadaban (*civil society*). Dalam konteks ini hakikat keterkaitan antara idiologi dan pendidikan, terletak pada prinsip bahwa pendidikan itu mempunyai tujuan transformatif dengan tiga sifat utama. Pertama, proses pendidikan merupakan suatu tindakan performatif, artinya tindakan untuk mencapai sesuatu; Kedua, tindakan pendidikan merupakan tindakan reflektif, artinya dalam pelaksanaannya dikaji benar akuntabilitas tindakan tersebut, termasuk kemanfaatannya bagi kemaslahatan bersama; Ketiga, proses pendidikan merupakan tindakan yang sadar tujuan. Artinya pendidikan itu dituntun oleh suatu sistem norma dan nilai-nilai yang telah dipilih untuk peserta didik. Pada posisi inilah organisasi sosial keagamaan mempunyai kepentingan untuk menyelenggarakan amal usaha bidang pendidikan, karena telah memiliki idiologi yang digali dari nilai-nilai atau paham keagamaan, seperti halnya sekolah agama.

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 114-118.

Penelitian Simandjuntak yang pada dasarnya menyoal kekuasaan di arena agama (Gereja) dan budaya Batak dapat diletakkan sebagai perspektif kajian kebudayaan, yakni kaitan antara kekuasaan dengan kebudayaan Batak.<sup>9</sup> Kalau hasil penelitian ini dijadikan sebagai acuan tesis, maka untuk kalangan Ummat Islam dapat dikatakan bahwa mereka telah mengalami perubahan sosial secara vertikal (mobilitas) dari sisi pendidikan, mereka telah memasuki arena politik praktis, ekonomi modern, sektor birokrasi, dan sebagian yang lain terserap dalam amal usahanya. Pertanyaanya, apakah mobilitas vertikal ini juga cenderung tidak banyak merubah pandangan warga ummat terhadap pertarungan kekuasaan dan perebutan peluang ekonomi, meskipun yang dikelola berorientasi amal usaha (sosial).

Kajian ini diletakkan pada perpaduan antara perspektif cultural studies dan kritis. Alasannya, terutama karena kedua perspektif ini mempunyai keberpihakan pada nilai dan komitmen pada perubahan struktur relasi sosial yang bersifat hegemonik-dominasi. Hal ini diperkuat dengan argumentasi Agger bahwa cultural studies, tidak hanya sebagai gerakan teoritis dan mode analisis, tetapi juga sebagai kritik budaya.<sup>10</sup>

Dalam bahasa *Cultural Studies* (CS) penggunaan kekuasaan dalam hubungan sosial disebut *power relation*. Para perintis *cultural studies* menyetujui secara sentralitas konsep kekuasaan yang dipandang berlangsung pada setiap level hubungan sosial. Kekuasaan bukan hanya perangkat yang menyatukan kehidupan sosial atau kekuatan koersif yang mensubordinasikan sekumpulan orang atas orang lain, melainkan proses yang membangun dan membuka jalan bagi segala bentuk tindakan, hubungan sosial dan tatanan sosial.<sup>11</sup> Lebih lanjut Foucault juga sependapat bahwa kekuasaan terdistribusi disemua relasi sosial dan tidak dapat direduksi menjadi bangunan dan determinasi ekonomi terpusat. Kekuasaan bukan hanya represif namun produktif, ia menghadirkan subyek, ia berimbas pada pembentukan kekuatan tumbuh dan menata. Foucault juga menekankan pada hubungan timbal balik yang saling membangun antara kekuasaan dan pengetahuan, sehingga pengetahuan tidak dapat

---

<sup>9</sup> Lihat B. Simandjuntak, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Prisma, No. 6, Juni 1996, hal. 15-27.

<sup>10</sup> Lihat B. Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik Penerapan dan Implikasinya*. Kreasi Wacana, 2005, hal. 248 & pada bagian lain Agger lebih menegaskan konsep cultural studies kritis, ibid hal. 282.

<sup>11</sup> Lihat C. Barker, *Cultural Studiars, Teori dan Praktik*. Kreasi Wacana. Yogyakarta. 2005. hal. 10.

dipisahkan dari rezim kekuasaan.<sup>12</sup> Foucault juga berutang pada Nietzsche yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentuk kehendak untuk berkuasa.<sup>13</sup> Kalau gagasan tentang kebenaran memiliki sandaran historis, maka ia merupakan konsekuensi dari kekuasaan yang bagi interpretasi dipegang sebagai suatu kebenaran. Baginya pengetahuan melekat pada kekuasaan, dan sebaliknya kekuasaan melekat pada pengetahuan.<sup>14</sup>

Salah satu definisi *cultural studies* oleh Dennett sebagaimana dikutip Barker adalah sebagai arena interdisipliner dimana perspektif dari berbagai disiplin dapat diambil dalam rangka menguji hubungan antara kekuasaan dan kebudayaan. *Cultural Studies* juga berusaha mengeksplorasi hubungan antara bentuk kekuasaan dan berusaha menghubungkan cara berpikir tentang kebudayaan dan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan oleh agen dalam upaya melakukan perubahan.<sup>15</sup> Jadi *cultural studies* tidak bersifat pro pada status-quo, tetapi mempunyai komitmen akan perubahan struktur relasi kekuasaan. Sejalan dengan argumen ini, Bourdieu sebagai sosiolog pendidikan, tidak percaya lagi terhadap ilmu yang bebas nilai, sehingga ia sekaligus terlibat di dalam ranah politik. Menurut dia sosiologi harus mampu menganalisis mekanisme dominasi agar bisa menjadi instrumen pembebasan bagi mereka yang didominasi.<sup>16</sup>

Dua dari lima karakteristik *Cultural Studies* yang dipandang perlu diuraikan disini, yaitu (1) untuk mengkaji pokok persoalannya dari sudut praktik kebudayaan dan hubungannya dengan kekuasaan. Tujuan tetapnya adalah mengungkapkan hubungan kekuasaan, mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi dan membentuk praktik kebudayaan; (2) tradisi *Cultural Studies* bukan tradisi kesarjanaan yang bebas nilai, melainkan tradisi yang mempunyai komitmen bagi rekonstruksi sosial dengan melibatkan diri dalam kritik politik. Jadi *Cultural Studies* bertujuan juga untuk mengubah struktur dominasi dalam masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid. hal. 83. untuk lebih detail lihat M. Foucault. *Power/Knowledge (Wacana Kuasa/Pengetahuan)*. Bentang Budaya, Yogyakarta. 2000: hal. 136-165.

<sup>13</sup> Bahkan Nietzsche mengkonsepsikan bahwa hidup sebagai kehendak untuk berkuasa. Lihat Sunardi, *Nietzsche*. Cetakan Ketiga. LKiS, Yogyakarta, 2001: hal. 48 dan 50.

<sup>14</sup> Lihat Barker, op. cit. 66 dan 147; dan G. Ritzer, *Teori Sosial Postmodern, Kreasi Wacana-juxtapose*, 2005, hal. 66.

<sup>15</sup> Ibid. hal. 7-8.

<sup>16</sup> Lihat Haryatmoko, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa; Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Bourdieu*. Basis, N. 11-12, Tahun ke-52, Nopember-Desember 2003. Hal. 4-8

<sup>17</sup> Lihat Z. Sardar dan B. Van Loon, *Cultural Studies for Beginners*. Mizan, Bandung. 2001, hal. 9.

Dari uraian di atas, maka dengan memandang bahwa arena pendidikan juga sebagai institusi kebudayaan yang bertanggung jawab terhadap transformasi sosial maka menjadi relevan dikaji dari perspektif *Cultural Studies*, meskipun obyek yang dikaji bukan kurikulum atau proses belajar mengajar dimana praktik transformasi itu berlangsung. Namun tentang relasi kekuasaan (dan resistensinya) antara *stakeholder* di sekolah sebagai pihak utama terselenggaranya proses pendidikan. Menurut Tilaar dalam studi kultural posisi pendidikan mendapatkan tempat yang sangat istimewa, karena transformasi sosial tidak terlaksana tanpa pendidikan. Karena itu, masalah kekuasaan, pendidikan dan *Cultural Studies* mempunyai bidang garapan yang sama.<sup>18</sup> Jangankan terhadap institusi pendidikan berbasis agama yang mengedepankan nilai-nilai rasionalitas, pengorbanan, ketulusan dan kebenaran, relasi kuasa pun secara material dapat menembus kedalam tubuh tanpa bergantung pada mediasi representasi subjek.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dalam kajian ini kita berangkat dari asumsi bahwa relasi kekuasaan juga beroperasi didalam arena pendidikan berbasis agama. Pendidikan berbasis agama tidak hanya karena simbol-simbol agama digunakan dalam mengelola pendidikan atau sekolah, tetapi terutama karena nilai-nilai agama dijadikan sebagai referensi untuk membangun institusi itu. Relasi kekuasaan dimaksud di sini bukan hubungan subjektif yang bersifat searah sebagaimana pengertian konvensional, yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Bagi Foucault, kekuasaan merupakan strategi kompleks dalam suatu masyarakat dengan perlengkapan, manuver, teknik dan mekanisme tertentu. Kekuasaan lebih beroperasi dari pada dimiliki, ia tidak merupakan hak istimewa yang didapat atau dipertahankan oleh kelas dominan, tetapi akibat dari keseluruhan posisi strategisnya, akibat yang menunjukkan posisi mereka yang didominasi. Selanjutnya ia menegaskan bahwa strategi kekuasaan melekat pada kehendak untuk mengetahui. Melalui wacana kehendak untuk mengetahui terumus dalam pengetahuan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Lihat Tilaar, op.cit., hal. 61-63.

<sup>19</sup> Lihat M. Foucault. *Power/Knowledge (Wacana Kuasa/Pengetahuan)*. Benteng Budaya, Yogyakarta. 2000: hal. 231.

<sup>20</sup> Dalam Haryatmoko, *Kekuasaan melahirkan anti-Kekuasaan: Menelanjangi mekanisme dan teknik kekuasaan bersama Foucault*. Basis, No. 1-2, tahun 51, Januari-Februari 2002, hal. 12.

Dimensi wacana penting dijelaskan karena memegang peran penting beroperasinya praktik dominasi kuasa. Arus wacana sendiri beroperasi kemungkinan pertautan antara dual hal yaitu persoalan kebenaran dan representasi. Sementara kebenaran itu sendiri menurut Foucault pada hakikatnya tidak bebas, karena upaya sampai pada kebenaran itu harus melalui relasi kekuasaan.<sup>21</sup> Pernyataan kebenaran sesungguhnya juga merefleksikan representasi, antara pihak yang benar dan salah dalam suatu arus wacana. Wacana yang dimasud merupakan kumpulan tanda atau simbol yang bertujuan untuk dimiliki dan diapresiasi atau bertujuan untuk dipercaya dan dipatuhi.<sup>22</sup> Proses berlangsungnya arus wacana ternyata sangat ditentukan dengan konteks sosial atau pasar linguistik. Konteks relasi-relasi sosial yang terkait dengan TK misalnya, tergantung pada arus wacana. Demikian pula konteks waktu juga menentukan wacana yang berkembang, seperti waktu penerimaan siswa baru, ada banyak wacana yang berkembang.

Hipotesis Foucault tentang relasi kekuasaan penting diketengahkan sebagai alat analisis selanjutnya. Ada enam hipotesis Foucault yang diringkas sebagai berikut.<sup>23</sup> Pertama, bahwa kekuasaan sama luasnya dengan lembaga sosial, tidak ada ruang yang sama sekali bebas dari jaringannya; Kedua, relasi-relasi kekuasaan saling terjalin dengan jenis-jenis relasi lain, seperti produksi, kekerabatan, dan keluarga; Ketiga, relasi-relasi ini tidak hanya berbentuk larangan dan hukuman, melainkan bentuk-bentuk yang beragam; Keempat, kesalinghubungan diantara mereka menggambarkan kondisi umum dominasi, dan dominasi ini diatur kedalam bentuk strategi yang kurang lebih koheren dan tunggal; Kelima, relasi-relasi kekuasaan benar-benar melayani, karena memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam strategi yang ada; Keenam, tidak ada relasi kekuasaan tanpa halangan, dan penghalangnya tidak harus sesuatu yang nyata, serta dapat hadir di mana-mana bersamaan dengan kekuasaan. Poin terakhir inilah yang dipahami bahwa kekuasaan senantiasa melahirkan resistensi, baik yang bersifat terselubung (*latent*) maupun terang-terangan (*manifest*).

---

<sup>21</sup> Lihat E. Balibar, *Konfrontasi Foucault dan Marx, Kritik terhadap Hipotesis Represi, praksis dan Struktur konflik*. Basis no. 1-2, Tahun ke-51, 2002. hal. 62.

<sup>22</sup> Lihat S.R Rusdiarti, *Bahasa Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan*, Basis No. 11-12, tahun ke-52, Nopember-Desember 2003. hal. 33.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 175.

Foucault juga mengembangkan konsep Panoptikon, suatu konsep yang semula digagas oleh J. Bentham. Walaupun konsep ini lebih menekankan pada sebuah bangunan fisik yang memungkinkan penguasa dapat mengontrol pihak yang didominasi (dihukum). Namun konsep ini dikembangkan untuk menjadi bentuk strategi penguasa untuk mengontrol warga Negara. Dalam arena pendidikan ini, aktor bisa berperan sebagai panoptikon, sebagaimana dikemukakan oleh Bantham bahwa setiap kawan menjadi pengawas. Bahkan Rousseau telah pula menyatakan sebaliknya, bahwa setiap pengawas seharusnya menjadi seorang kawan.<sup>24</sup> Melalui konsep ini, pihak yang dominan di arena pendidikan ini kemudian menjadikan teman dan atau bahawahannya sebagai panoptikon. Dengan adanya panoptikon ini, maka strategi dan mekanisme dominasi pihak yang berkuasa bisa berjalan lancar dan dalam jangka panjang.

Mengingat banyaknya pengertian atau makna idiologi yang dikemukakan para ahli, pada bagian ini hanya digambarkan secara sekilas dari pemikiran Raymond William dan Antonio Gramsci. William mencoba pengklasifikasikan istilah idiologi dalam 3 ranah.<sup>25</sup> Pertama, sebagai sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. Kedua, sebagai sistem kepercayaan yang dibuat - ide palsu atau kesadaran palsu- yang biasa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Dalam pengertian ini idiologi dibuat dari kesadaran palsu dimana oleh kelompok yang berkuasa atau dominan digunakan untuk mendominasi kelompok lain. Karena kelompok yang dominan menggunakan perangkat idiologi tersebut dan disosialisasikan dalam masyarakat melalui institusi politik, pendidikan dan media massa, maka kelompok yang didominasi melihatnya sebagai sesuatu yang tampak natural dan diterima sebagai kebenaran. Ketiga, idiologi sebagai proses umum produksi makna dan ide. Dalam istilah ini, idiologi digunakan untuk memproduksi makna melalui wacana, khususnya melalui media.<sup>26</sup>

Idiologi tidak hanya diartikan sebagai sebuah sistem ide tetapi lebih dari itu juga disepakati oleh Gramsci. Ia mencoba membedakan antara sistem yang berubah-ubah (*arbitrary systems*) yang dikemukakan para filosof dan intelektual dan idiologi organik yang bersifat historis (*historically organic ideologies*), yaitu idiologi yang

---

<sup>24</sup> Lihat Foucault. op.cit. hal. 181-190.

<sup>25</sup> Dalam Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*, LkiS, Yogyakarta, 2004, hal. 87-94.

<sup>26</sup> Lihat juga D. Cavallaro, *Critical and Cultural Teori*. Niagara, 2004, hal. 136-137. Dia juga menempatkan agama sebagai idiologi dan filsafat.

diperlukan dalam kondisi sosial tertentu, sejauh idiologi itu secara historis diperlukan dan mempunyai keabsahan, untuk mengatur manusia, memberikan tempat baginya untuk bergerak dan mendapatkan kesadaran akan posisi serta perjuangan mereka. Oleh karena itu, idiologi bukan sesuatu yang berawang-awang dan di luar aktifitas sosial politik, tetapi ia mempunyai aktifitas praktis, memberikan aturan bagi tindakan praktis, dan perilaku moral manusia serta pemahaman antara konsep dunia dan norma tingkah laku.<sup>27</sup>

Kajian teoritik dan sejumlah hasil penelitian relevan di atas memberi gambaran bahwa betapa kompleksnya dimensi yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam suatu institusi sosial, khususnya institusi pendidikan sebagai salah satu institusi utama dalam masyarakat. Relasi Kekuasaan dalam suatu institusi dengan demikian memiliki variasi basis idiologi, keluasan konteks dan keragaman struktur serta kultur. Suatu hal yang perlu ditegaskan bahwa teori-teori di atas sesungguhnya hendak menyatakan hal yang sama dengan cara berbeda. Semua institusi dalam masyarakat senantiasa terjadi pola relasi kuasa yang tidak seimbang, ada yang dominan dan ada yang didominasi, ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai, dan dalam proses itu terjadi dinamika perlawanan atau resistensi yang berpeluang meluas dan mendalam implikasinya.

### **POTENSI BEROPERASINYA PRAKTIK KEKUASAAN**

Dari uraian teori praktik atau relasi kekuasaan di atas dapat dirumuskan bahwa sumber kekuasaan, praktik dominasi kekuasaan dan resistensi dapat berlangsung di arena pendidikan berbasis agama. Basis agama yang dimaksud tidak terbatas pada penggunaan simbol-simbol agama dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi terutama agama sebagai rujukan nilai-norma atau sumber acuan untuk membangun lembaga pendidikan. Jadi dalam konteks ini agama dimaknai sebagai sumber idiologi untuk menata institusi pendidikan.

Aktor atau unit organisasi di arena pendidikan, seperti pengelola (yayasan), guru, komite dan wali murid merupakan stakeholder yang berada dalam suatu relasi kekuasaan. Pihak yang potensial menjadi pihak dominant adalah pengelola atau yayasan. Namun, peluang yang sama beralku bagi kepala sekolah atau dinas pendidikan. Posisi didominasi atau mendominasi sangat tergantung dengan otoritas yang dimiliki, selain kontruksi idiologi oleh para aktor di arena pendidikan.

---

<sup>27</sup> Simon, 2000. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Insist-Pustaka Pelajar. Yogyakarta.op.cit, hal. 83-84.

Hipotesis yang dibangun adalah praktik kekuasaan oleh para actor tidak berlangsung diruang hampa (*vacuum*), ia mempunyai sumber atau struktur kekuasaan, dan dengan modal kekuasaan itu akan menjadi modal untuk untuk mendominasi pihak lain. Praktik dominasi melahirkan resistensi, dan resistensi ini selanjutnya membentuk reproduksi modal kekuasaan sekaligus praktik dominasi baru. Jadi proses ini berlangsung terus, sampai suatu saat terjadi perimbangan atau penguatan, atau bahkan ada pihak yang kehilangan kekuasaan.

Modal kekuasaan yang dimaksud meliputi idiologi (agama-pendidikan), pengetahuan para aktor dan otoritas yang dimiliki pihak-pihak yang berada didalam suatu relasi kuasa. Kekuasaan tidak hanya represif tetapi sekaligus memproduksi pengetahuan, sebaliknya pengetahuan memperkuat dominasi kekuasaan. Demikian pula idiologi-agama merupakan institusi produksi pengetahuan untuk kekuasaan yang sangat dahsyat. Dengan alasan pendisiplinan individu dan masyarakat diatur melalui penyeragaman, baik perilaku bahasa, pakaian maupun ritus-ritus. Idiologi pendidikan berbasis agama biasanya dituangkan dalam visi-misi, lengkap dengan sejumlah ayat-ayat sebagai legitimasinya.

Dengan merujuk pada pandangan bahwa dimana ada kuasa di situ ada resistensi, dan setiap wacana tidak tanpa tanding, setiap hegemoni selalu menghasilkan resistensi, maka dimensi resistensi penting untuk dianalisis.<sup>28</sup> Dengan adanya resistensi ini akan dapat diketahui sejauh mana konflik antara *stakeholders* dapat bersifat tertutup (*latent*) atau terbuka (*manifest*), dan diketahui pula tingkat intensitas konfliknya, baik dalam bentuk kekerasan simbolik maupun kekerasan terbuka. Dalam situasi seperti ini pihak yang didominasi berpotensi terpola menjadi, ada pihak yang melawan arus dan ada pula yang pasif-akomodatif. Jika situasi ini berlangsung terus akan berimplikasi pada kinerja praktisi pendidikan, termasuk partisipasi dari *stakeholders* yang hendak diakomodasi dari perubahan kebijakan kelembagaan. Kebijakan pemberhentian guru yang tidak mendasar misalnya, potensial berimplikasi pada citra buruk sekolah dimata wali murid.

Implikasi lebih jauh terhadap praktik dominasi kekuasaan antar *stakeholder* di arena pendidikan akan berpengaruh hubungan guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Program

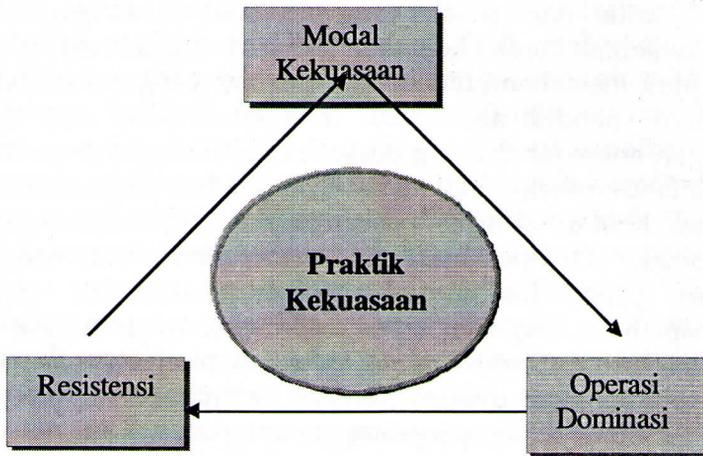
---

<sup>28</sup> Lihat Adian Menabur *Kuasa, Menuai Wacana. Basis, No. 1-2, tahun 51, Januari-Februari 2002, hal. 48.*

kegiatan sebagai produk dominasi kuasa juga potensial melahirkan dominasi kuasa oleh guru terhadap murid. Materi pembelajaran yang sering dicerna oleh murid pada berbagai kesempatan, seperti hormat, patuh dan tunduk pada orang tua dan guru, potensial menjadi instrumen relasi kuasa, tidak hanya guru dengan murid, tetapi juga pengurus yayasan terhadap guru. Akibatnya, sikap kritis, kreatif, bebas dan penuh inisiatif, baik guru maupun murid tidak bisa berkembang dengan baik. Namun, demikian pihak yang didominasi juga memiliki potensi untuk melawan terhadap praktik kekuasaan.

Untuk memudahkan pemahaman kerangka pemikiran kajian ini, divisualisasikan dalam bentuk gambar di bawah ini.

**Gambar 1. Skema Kerangka Operasi dan Resistensi Kekuasaan**



Sumber: *dilaborasi dari Foucault, Bourdieu dan Dahrendorf*<sup>29</sup>

Skema ini bisa disebut sebagai model segi tiga dengan praktik kekuasaan sebagai sumbu utamanya. Sedangkan dimensi modal kekuasaan, oprasi praktik dominasi kekuasaan dan resistensi kekuasaan merupakan sub dimensi yang dianalisis. Tanda panah yang menunjuk ke arah jarum jam menunjuk pada tahap analisis dari tiga dimensi relasi kuasa tersebut.

Modal kekuasaan yang dapat menjadi modal awal untuk membangun praktik dominasi, tidak terbatas dari otoritas tetapi juga pengetahuan, idiologi agama dan kepribadian atau karakter aktor-

<sup>29</sup> Foucault, khususnya dalam Buku *Power/Knowledge* oleh Colin Gordon, 1980; dan review sejumlah karya Boudieu dalam Basis, No. 11-12, Nop.-Des. 2003. Nomor ini merupakan Edisi Khusus Pierre Bourdieu.

aktor yang berada dalam arena pendidikan. Modal awal ini akan semakin sinergis pada situasi konflik yang makin intens dan disertai kekerasan simbolik. Di dalam arena pendidikan berbasis keagamaan yang biasanya menekankan pada kepatuhan, keikhlasan, pengorbanan sebagai idiologinya, justru seringkali menjadi instrumen terbentuknya pola hubungan yang hegemonik. Atas nama amal jariah misalnya, bantuan donatur akhirnya tidak dinikmati murid atau guru, karena digunakan untuk pengadaan sarana prasarana dimana penyelenggara pendidikan dapat mendapatkan keuntungan yang melebihi batas kewajaran. Dalam situasi ini seringkali tidak terasa adanya unsur dominasi, bahkan eksploitasi baik terhadap profesi guru, maupun 'eksplorasi' terhadap murid atau wali murid. Dalam situasi ini berarti relasi kekuasaan yang tidak seimbang mengalami gugatan atau perlawanan, karena adanya suatu kesadaran kritis dari pihak yang didominasi untuk melawan, sehingga terjadilah konflik kekuasaan secara terbuka (manifest).

Untuk memahami fenomena resistensi yang mungkin terjadi pada arena pendidikan, selain dengan melihat posisi juga kepentingan antar pihak yang berlawanan.<sup>30</sup> Dengan pemetaan ini, akan diketahui pihak-pihak utama yang ada dalam arena relasi kekuasaan, berikut dengan posisinya dan kepentingan masing-masing pihak.<sup>31</sup> Dari posisi ini pula sudah mulai tergambar modal kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang potensial berlawanan, baik, bagi pihak yang dominan maupun pihak yang didominasi, termasuk pihak yang bersikap pasif atau akomodatif. Apalagi dihubungkan dengan konteks demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, maka akan tampak pihak yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan fungsi kelembagaan baru, terutama karena dikontrol oleh kepentingannya.

Intensitas resistensi terhadap dominasi relasi kuasa, tidak hanya terbatas pada penggunaan otoritas yang telah dimiliki (modal kekuasaan), tetapi juga dengan pertarungan wacana tentang kebenaran dan representasi. Jadi masing-masing pihak potensial untuk mengklaim sebagai pihak benar sedang lawan sebagai pihak yang salah. Tidak hanya itu, representasi atau identitas kelompok pun berpeluang digunakan, sehingga ada pihak kita (*self*) dan ada pihak mereka (*others*). Dalam kondisi seperti ini pihak yang dapat memaksimalkan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki, apalagi jika menghalalkan manipulasi (data) dan informasi (pengetahuan), maka

---

<sup>30</sup> Lihat S. Fisher dkk. op.cit. hal. 19-20.

<sup>31</sup> Ibid.

akan keluar sebagai 'pemenang', dan pihak yang menang ini pula seringkali dipandang sebagai pihak yang benar. Jadi kekuasaan dan kekuatan menentukan 'kebenaran', khususnya pihak yang dipandang benar atau salah. Demikian pula pihak yang paling representatif untuk mewakili suatu agen atau struktur sosial ditentukan oleh relasi kekuasaan atau kekuatan.

Jika situasi di atas yang berlangsung maka komunikasi bebas dominasi (dalam bahasa Habermas) sebagai suatu bentuk relasi sosial yang ideal tidak dapat terpenuhi. Dalam konteks inilah kemudian nilai-nilai agama yang menjadi basis penyelenggaraan pendidikan cenderung tidak mampu disinergikan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Padahal keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu terwujudnya humanisasi dan keadilan sosial. Komunikasi dan atau wacana yang bebas dominasi sebagai prasarat utama menuju demokrasi deliberatif -bebas dan beradab- menurut Habermas.<sup>32</sup>

Apabila situasi ini berlangsung terus, maka idiologi yang menjadi basis berdirinya suatu institusi dengan sendirinya akan sirna (hilang), baik yang bersumber dari nilai-nilai agama maupun pendidikan. Sendi-sendi demokrasi yang ingin disemaikan menjadi tenggelam dengan sendirinya. Pada situasi inilah kesadaran kritis, kehendak kolektif dari pihak yang didominasi untuk melakukan perlawanan dan perubahan sangat diperlukan sehingga pada saat bersamaan kehadiran intelektual kritis atau organik diperlukan untuk terlibat langsung dalam arus wacana, melawan praktik dominasi dan merumuskan jalan menuju keseimbangan kekuasaan (deliberatif) dan komunikasi antar *stakeholder*.

Dalam konteks kajian ini posisi penulis ditempatkan sebagai aktor di arena pendidikan yang misinya untuk pemberdayaan (*empowerment*), sehingga tidak hanya sekedar mengkritisi teks sosial yang berlangsung, tetapi sekaligus terlibat untuk menata pola struktur relasi kuasa yang baru, bebas dari dominasi, komunikatif dan humanis, atau deliberatif meminjam istilah Habermas. Usaha ke arah pemberdayaan ini sejalan dengan pemikiran Fraire seorang tokoh sosiologi pendidikan kritis yang banyak menyoroti dehumanisasi di arena pendidikan.<sup>33</sup>

\*\*\*

---

<sup>32</sup> Lihat F. Magnis-Suseno, *75 Tahun Jurgen Habermas*. Basis No. 11-12, Nop.-Des. 2004. Hal. 6.

<sup>33</sup> Lihat Fraire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terjemahan, Kerjasama Pustaka Pelajar dan Read, 2004, khususnya pada halaman 180 dan 195.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny G. 2002. *Menabur Kuasa, Menuai Wacana*. Basis, No. 1-2, tahun 51, Januari-Februari 2002, Hal. 42-49.
- Agger, Ben. 2005. *Teori Sosial Kritis; Kritik Penerapan dan Implikasinya. Kreasi Wacana*, Cetakan Kedua, Yogyakarta.
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies, Teori dan Praktek*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Chamim, Asykuri ibn. 2003. *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan, menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah LPPP UMY, The Asia Foundation. Yogyakarta.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Cetakan 4, LKIS. Yogyakarta.
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council-Responding to Conflict, Jakarta.
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge (Wacana Kuasa/Pengetahuan)*. Terj. Yudi Santosa. Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Freire, Paulo. 2004. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Penyunting Mas'ud. Pustaka Pelajar-READ, Yogyakarta.
- Hardiman, F. Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Kanisius, Yogyakarta.
- Haryatmoko. 2002. *Kekuasaan melahirkan anti-Kekuasaan: Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan bersama Foucault*. Basis, No. 1-2, tahun 51, Januari-Februari 2002. Hal. 8-21.
- Haryatmoko. 2003. *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa; Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Bourdieu*. Basis, No. 11-12, Tahun ke-52, Nop-Desember 2003.
- Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi (editor). 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita-Bappenas, Depdiknas. Yogyakarta.
- Kristanto, L. Dedy. 2001. *Menertawakan Kekuasaan ala Antonio Gramsci*. Basis, No. 09-10, tahun ke-50, September-Oktober 2001, hal. 59-64.
- Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim, (editor). 1996. *Bahasa dan kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Mizan, Bandung.

- O'Neil, William F. 2001. *Idiologi-Idiologi Pendidikan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pelly. Usman. 1993. *Pengukuran Intensitas Potensi Konflik dalam Masyarakat majemuk*. Analisis CSIS. Tahun XXII, No. 3. Mei-Juni 1993.
- Rusdiarti, Suma Riella. 2003. *Bahasa, Pertarungan Simbolik dan Kekuasaan*. Basis, No. 11-12, Tahun ke-52, Nopember-Desember 2003. Hal. 31-40.
- Sardar, Ziauddin dan B.van Loon. 2001. *Cultural Studies for Beginners*. Mizan, Bandung.
- Simandjuntak, Bungaran A. 1996. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Majalah Prisma. No. 6, Tahun XXV, Juni 1996.
- Simon, Roger. 2000. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Insist-Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Dunia Ketika*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sukarno, Makmuri; Titik Handayani dan Soewartoyo. 2004. *Otonomi Daerah dan Pluralitas Lokal*. Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta.
- Sunardi, ST. 2001. *Nietzsche*. Cetakan Ketiga. LKiS, Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Indonesiatara, Magelang.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Sosiologi, Teori dan Metodologi*. Cired, Yogyakarta.
- . 2004. *Peta Pendidikan versi Koalisi Pendidikan*. Republika, 19 Nopember 2004.
- . 2005. *Cerita tentang Arogansi Kekuasaan*. Laporan Akhir Tahun 2005 Humaniora, Kompas, 16 Desember 2005. Hal. 65-66.